

IMPLEMENTASI APLIKASI SETIA 2.0 SEBAGAI SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Sharfina Agista Ramadhani⁽¹⁾, Hendra Wijayanto⁽²⁾

Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

e-mail: sharfinagista31@gmail.com, hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The development of digitalization has encouraged local governments to transform the management of research and innovation, including through the creation of SETIA 2.0 by the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Sidoarjo Regency as a system for controlling regional research and innovation. This study aims to describe the implementation of the application using qualitative methods through observation, interviews, and documentation. The results show that digital reporting improves the effectiveness of assistance, data integration, and managerial control over proposals. Based on George C. Edward III's policy implementation theory, the aspects of communication, disposition, and bureaucratic structure have been implemented well, while resources have not been optimally fulfilled, particularly relating to human resource capacity and technical support. These findings indicate that digitalization through SETIA 2.0 is a strategic step in strengthening regional innovation governance and shows that digital transformation can enhance research management and contribute to improving innovation performance in regional government.

Keywords : *E-government, policy implementation, regional research and innovation*

ABSTRAK

Perkembangan digitalisasi mendorong pemerintah daerah untuk mentransformasi tata kelola riset dan inovasi daerah, termasuk melalui perkembangan aplikasi SETIA 2.0 oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai sistem pengendalian pelaksanaan riset dan inovasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi aplikasi SETIA 2.0 dengan menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan mampu meningkatkan efektivitas pendampingan, integrasi data, serta kontrol manajerial terhadap usulan riset dan inovasi daerah. Berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III menunjukkan bahwa aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah terlaksana dengan baik, sementara aspek sumber daya belum terpenuhi secara optimal terutama pada kapasitas sumber daya manusia dan dukungan teknis implementasi aplikasi SETIA 2.0. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui aplikasi SETIA 2.0 merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola inovasi daerah dan menjadi bukti bahwa transformasi digital mampu memberikan kinerja positif tata kelola pemerintahan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, pemerintahan digital, riset dan inovasi daerah,

1. Pendahuluan

Di era globalisasi yang semakin maju, segala aspek kehidupan diharuskan untuk

mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tuntutan tersebut menyasar ke berbagai sektor mulai dari produsen, pedagang, hingga pemerintah sebagai

penyedia layanan publik. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk beradaptasi melalui berbagai kebijakan yang menekankan pentingnya modernisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kapasitas pemerintah suatu daerah. Transformasi digital yang berkembang pesat di sektor pemerintahan juga membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan proses administrasi, pengambilan keputusan, hingga penyampaian layanan kepada masyarakat.

Riset dan inovasi merupakan hasil dari globalisasi yang bertujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya akan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Menurut Boschma dan Frenken dalam (Sonn, 2021) inovasi muncul akibat adanya kebutuhan baru yang menunjang rutinitas kerja suatu organisasi. Kebutuhan-kebutuhan yang telah ada sebelumnya berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan inovasi serta sebagai strategi pembangunan regional yang lebih efektif.

Bagi suatu daerah, riset dan inovasi merupakan elemen krusial yang wajib dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan kreativitas dari suatu daerah, sehingga mampu menghasilkan sebuah inovasi yang dapat menunjang kinerja pemerintah daerah. Perkembangan inovasi di lingkungan pemerintah daerah merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan *good government*. Sebuah riset dan inovasi tidak terbatas pada penyediaan layanan publik bagi masyarakat luas, tetapi juga mencakup tata kelola yang memfasilitasi operasional sistem pemerintahan. Inovasi tidak hanya berasal dari gagasan para aktor pemerintahan, melainkan dapat berasal dari pemikiran masyarakat untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang ada. Dengan adanya inovasi, diharapkan dapat menghadirkan sistem birokrasi yang

berorientasi pada kepentingan masyarakat umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, regulasi tersebut berisi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif dan kreatif. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 memuat Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kedua peraturan tersebut dirancang untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah guna mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun sistem pemerintahan daerah. Pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut tentunya perlu diperkuat melalui langkah-langkah dan kebijakan strategis, agar inovasi tidak sekedar menjadi slogan atau semboyan, melainkan benar-benar menjadi kebutuhan praktis untuk dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, yang mendukung implementasi aplikasi SETIA 2.0 sebagai sistem pelaporan penelitian dan inovasi daerah.

Penyampaian inovasi merupakan proses strategis yang berperan penting dalam mendukung implementasi program guna meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Namun dalam praktiknya, inovasi tidak selalu dapat tersampaikan secara optimal. Hambatan tersebut timbul ketika teknologi belum sepenuhnya berkembang untuk mendukung kinerja organisasi. Penyampaian inovasi dari pemerintah daerah masih terbatas pada sistem konvensional. Keterbatasan tersebut meliputi aspek kecepatan, jangkauan audiens, serta efektivitas penyampaian pesan. Menurut Effendy dalam (Suwarno,

2025) menjelaskan bahwa komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat diterima, ditindaklanjuti sesuai dengan tujuan awal komunikasi dilakukan. Dengan demikian, penyebaran informasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas saluran komunikasi yang digunakan. Dalam suatu sistem inovasi, keberadaan para aktor pengembang ilmu teknologi, pengguna sistem, serta pihak-pihak lain yang berkontribusi, menjadi kunci utama dalam membentuk ekosistem inovasi yang adaptif dan kondusif.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diperkuat melalui langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo bidang Rendalev Litbang yang secara spesifik menangani riset suatu masalah dan inovasi daerah, mengalami hambatan akibat keterbatasan media penunjang kinerja mereka. Sehingga muncul sebuah inovasi baru bernama “SETIA” sebagai alternatif dalam mempercepat mobilitas pelaporan inovasi dari pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo. Inovasi tersebut merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan inovasi, sehingga inovasi yang dilaporkan dapat terinventarisasi dengan baik apabila diperlukan pengembangan di masa mendatang. Situasi ini menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah yang harus bergerak lebih progresif dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi, sehingga setiap kebijakan dan inovasi dapat didukung oleh data, teknologi, serta sistem pelaporan yang lebih modern dan transparan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu serangkaian proses kebijakan yang telah dirumuskan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Warjio Afandi dalam (Mansur, 2021) menjelaskan bahwa

pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasar pada acuan norma yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa hasil kebijakan selaras dengan tujuan awalnya. Kebijakan memerlukan strategi yang tepat agar implementasinya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan merupakan kontribusi dari semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi. George C. Edwards III dalam (Sutmasa, 2021) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Menurutnya, sebuah kebijakan tidak akan berjalan optimal apabila implementasinya tidak efektif. Dalam karyanya, Edward merumuskan empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan:

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal, maka pelaksana kebijakan harus memahami secara menyeluruh substansi kebijakan yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah agar pembuat kebijakan dapat mengkomunikasikan informasi dengan jelas, tanpa adanya hambatan terkait pengetahuan. Menurut Edwards III, terdapat tiga variabel indikator yang harus dipenuhi agar komunikasi kebijakan berjalan efektif, yaitu penyampaian (transmission) antara komunikator dengan komunikan, kejelasan pesan yang akan disampaikan untuk menghindari penyimpangan dari tujuan yang diinginkan, serta selalu

mempertimbangkan faktor-faktor hambatan komunikasi yang berpotensi terjadi.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yang mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan informasi dan fasilitas pendukung implementasi kebijakan seperti anggaran dan fasilitas kerja, serta wewenang yang memadai dan diakui bagi pelaksana kebijakan. Kapasitas sumber daya yang disediakan harus sejalan dengan kompleksitas masalah, cakupan yang luas, serta mendukung capaian tujuan yang diinginkan.

C. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan variabel yang memengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Setiap pelaksana kebijakan harus memahami tugas yang harus dilakukan serta memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, guna menghindari bias dalam praktiknya. Edwards III menyatakan bahwa diperlukan kesamaan perspektif antara pembuat kebijakan dengan implementor kebijakan (birokrat). Secara umum, birokrat memiliki potensi untuk melakukan penyimpangan dalam sikapnya terhadap kebijakan publik. Hal tersebut dapat menjadi hambatan utama bagi efektivitas implementasi kebijakan.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan. Apabila struktur birokrasi pada kebijakan menjadi tidak kondusif, namun memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, maka sumber daya yang tersedia akan menjadi tidak efektif, sehingga menghambat jalannya suatu kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan melalui proses politik memerlukan dukungan dari birokrasi sebagai pelaksana

kebijakan. Suatu kebijakan secara umum tidak akan jauh dari unsur-unsur seperti keterlibatan banyak orang, perubahan perilaku untuk disesuaikan, serta pemanfaatan sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien.

2. Metode

Metodologi merupakan landasan penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai pedoman sistematis untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara terarah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan metode penelitian yang tepat, penelitian tidak hanya mampu menjawab permasalahan secara akurat, melainkan juga menghasilkan temuan yang valid dan relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi nyata dilapangan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Sidoarjo, terutama bagaimana Bappeda Kabupaten Sidoarjo khususnya Bidang Rendalev Litbang dalam mengimplementasikan pemanfaatan aplikasi SETIA 2.0 sebagai sistem pengendalian pelaksanaan riset dan inovasi daerah. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo dapat meraih penghargaan Kabupaten terinovatif pada ajang penghargaan Innovative Government Award (IGA) pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kemajuan inovasi di daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis yang didasarkan pada data empiris. Pendekatan

deskriptif dipilih agar penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi aplikasi SETIA 2.0 sebagai sistem pengendalian pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Kabupaten Sidoarjo. John W. Creswell dalam (Kusumastuti & Khoiron, 2019) menyatakan bahwa konsep dasar dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali dan memahami suatu makna yang dianggap sebagai masalah sosial sehingga dirumuskan oleh sekelompok individu. Proses penelitian kualitatif berlangsung karena adanya upaya-upaya penting yang mendukung penelitian tersebut, seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga mengubah data menjadi kalimat yang mudah dipahami oleh publik. Penulis akan menggunakan metode kualitatif untuk menggali secara mendalam mengenai implementasi aplikasi setia, mulai dari aspek kelancaran komunikasi, pemanfaatan sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang ada didalamnya.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif guna memberikan gambaran faktual dan objektif terkait implementasi kebijakan yang diterapkan. Teknik pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian karena inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data. Jika peneliti tidak menguasai teknik pengumpulan data secara tepat, maka informasi yang dikumpulkan berisiko tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Baba, 2017).

Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Menurut Singarimbun dan Effendi dalam (Herdayati & Syahril, 2019) mengatakan bahwa wawancara merupakan salah satu komponen paling krusial dalam suatu survei. Penelitian ini menerapkan teknik wawancara semi-terstruktur. Dalam pelaksanaannya, pengumpul data telah menyiapkan pedoman wawancara, namun

penyampaianya memberikan keleluasaan untuk memperdalam pertanyaan tanpa terbatas pada pertanyaan yang spesifik (Romdona et al., 2025). Selanjutnya menurut Zuriah dalam (Fiantika et al., 2022), observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang terlihat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi terus terang atau samar. Pengumpul data akan secara terbuka menyampaikan kepada sumber data bahwa penelitian sedang berlangsung. Sedangkan menurut (Putri & Murhayati, 2025) dokumen pada dasarnya merupakan rekaman mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi. Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan untuk menelusuri informasi historis mengenai individu, peristiwa, maupun fenomena sosial, sehingga sangat relevan dalam penelitian kualitatif. Ketiga teknik tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang saling melengkapi agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

Setelah kebutuhan data telah dikumpulkan maka akan dilakukan analisis terhadap data yang telah ada. Menurut Bogdan dalam (Rahmani et al., 2025), analisis data merujuk pada proses pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber lainnya melalui pengelolaan, yang kemudian dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil, penyusunan pola tertentu, memilih informasi yang relevan, serta penarikan kesimpulan agar data dapat dipahami. Pada penelitian ini, tahapan analisis yang akan dilakukan dibagi menjadi 4 alur. Tahapan analisis data menurut Miles and Huberman dalam (Baba, 2017) yaitu pengumpulan data (*data collection*), penyederhanaan data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*). Setelah ditarik kesimpulan, maka akan ditampilkan

data dalam format naratif berupa teks dan gambar, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip implementasi aplikasi SETIA 2.0.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Transformasi Digital Riset dan Inovasi Kabupaten Sidoarjo

Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan transformasi digital dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan, salah satunya yaitu dalam bidang riset dan inovasi daerah. Kabupaten Sidoarjo, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi salah satu daerah yang berkomitmen untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi melalui digitalisasi proses kerja.

Namun dalam pelaksanaannya, muncul hambatan berupa ketiadaan sistem pelaporan inovasi yang terintegrasi antar perangkat daerah, sehingga Bappeda Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mendampingi secara langsung proses pengusulan inovasi. Untuk mengatasi hambatan dalam menginventarisasi inovasi-inovasi yang ada di jajaran pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Bappeda Kabupaten Sidoarjo mengembangkan sebuah inovasi yaitu aplikasi SETIA 2.0, yang bertujuan untuk memfasilitasi pendampingan dan pemantauan bagi perangkat daerah yang bermaksud mengajukan sebuah inovasi. Aplikasi SETIA (Sistem Riset dan Inovasi Daerah) merupakan aplikasi berbasis web yang diusulkan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo pada akhir tahun 2022, sebagai implementasi atas tugas yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian inovasi daerah. Aplikasi SETIA merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yaitu Simlitbang. Namun aplikasi Simlitbang hanya berfokus pada manajemen penelitian dan pengembangan

saja. Adanya aplikasi SETIA diharapkan pada saat pelaporan inovasi tidak saling tumpang tindih, memudahkan pengaturan kerangka acuan kerja, hingga tahap pelaporan yang terintegrasi.

Sebelum adanya aplikasi SETIA, pengelolaan pelaporan riset dari perangkat daerah lain dilakukan secara manual melalui surat menyurat. Dalam perkembangannya semakin banyak kajian yang perlu difasilitasi pembahasannya. Selain itu sistem penyimpanan yang belum terdigitalisasi menjadi hambatan bagi implementor untuk menemukan dokumen secara cepat. Tidak adanya sistem yang terintegrasi menjadikan perangkat daerah yang ingin melaporkan inovasi mereka, secara langsung mengirimkannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut menyebabkan Sidoarjo memperoleh nilai yang kurang baik karena minimnya pendampingan maupun monitoring sejak awal penyusunan proposal.

Mendasari kelemahan tersebut, maka dikembangkanlah Simlitbang berupa hard disk yang memantu inventaris pelaporan riset. Simlitbang kemudian berkembang menjadi sebuah aplikasi berbasis web yang terbatas pada pelaporan pengajuan riset saja. Dalam perkembangannya, muncul permintaan dari perangkat daerah pengusul untuk fitur yang dapat memudahkan mereka melihat usulan kelompok lainnya, sehingga meminimalkan terjadinya inovasi yang sama. Pada tahun 2018, adanya pengembangan aplikasi Simlitbang menjadi aplikasi SETIA yang dilengkapi dengan menu inovasi sebagai respon terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016. Tujuan dari adanya menu inovasi tersebut adalah agar perangkat daerah pengusul yang ingin mengajukan sebuah inovasi, melaporkannya terlebih dahulu ke aplikasi SETIA sebelum dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, Bappeda Kabupaten Sidoarjo memiliki kesempatan untuk memberikan pendampingan dan validasi

lebih awal, serta memastikan bahwa setiap laporan inovasi memenuhi kriteria dan kelengkapan administrasi sesuai pedoman nasional. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan sistem yang lebih komprehensif melahirkan SETIA 2.0, yang tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga alat pengendalian dan monitoring terhadap riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. SETIA 2.0 mengintegrasikan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan dalam satu platform digital yang mudah digunakan dan saling terhubung antara perangkat daerah.

Tujuan pengembangan aplikasi SETIA 2.0 adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan riset dan inovasi di Kabupaten Sidoarjo dengan memanfaatkan kemajuan sistem digitalisasi yang terintegrasi dan transparan. Melalui penerapan sistem aplikasi SETIA yang terbaru, Bappeda Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap proses riset dan inovasi dari setiap perangkat daerah pengusul. Pengawasan yang dilakukan secara digital memungkinkan proses pemantauan

menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus mengurangi potensi keterlambatan pelaporan, serta meningkatkan kualitas hasil riset berkat adanya sistem seleksi.

Seluruh upaya tersebut secara langsung bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Dengan sistem digitalisasi yang terstruktur dengan baik, proses pengumpulan data, penyusunan laporan, hingga verifikasi bukti dukung dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis dan terukur. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi peningkatan nilai IID Kabupaten Sidoarjo, yang menunjukkan adanya tren positif dalam tata kelola inovasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan e-government. Pada tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo pada akhirnya mendapatkan penghargaan Kabupaten Terinovatif pada ajang penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 (Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 2025). Berikut merupakan tabel penilaian indeks inovasi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024.

Tabel 1. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

Tahun	Predikat
2020	Sangat Inovatif
2021	Inovatif
2022	Sangat Inovatif
2023	Sangat Inovatif
2024	Sangat Inovatif

Berdasarkan data pada Tabel 1 mengenai penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024 dalam (Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, 2024), menunjukkan bahwa kinerja inovasi daerah menunjukkan tren yang konsisten dan positif. Pada tahun 2020, Sidoarjo memperoleh predikat “Sangat Inovatif”, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi “Inovatif”. Meskipun demikian, penurunan tersebut bersifat sementara karena pada tahun-tahun berikutnya, Sidoarjo kembali memperoleh predikat “Sangat Inovatif” secara berturut-turut selama tiga tahun. Pola ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu melakukan evaluasi serta perbaikan strategi inovasi setelah tahun 2021, sehingga tingkat inovasi daerah dapat pulih dan bertahan pada kategori terbaik. Konsistensi predikat “Sangat Inovatif” selama tiga tahun terakhir mencerminkan matangnya ekosistem riset dan inovasi yang bertujuan untuk mencapai target daerah.

B. Implementasi Aplikasi SETIA 2.0

Dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward dalam (Sutmasa, 2021), terdapat empat aspek yang menjadi dasar kelancaran implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun SETIA 2.0 bukan sebuah kebijakan, namun aplikasi SETIA 2.0 merupakan hasil dari kebijakan pemerintah pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya menjadi salah satu indikator kinerja daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam implementasi aplikasi SETIA yang dilakukan oleh petugas Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo harus memperhatikan keempat aspek tersebut.

1) Komunikasi

Terdapat beberapa komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Litbang dalam implementasi aplikasi SETIA 2.0. Pertama, komunikasi yang dilakukan yaitu melalui sosialisasi aplikasi SETIA 2.0 sebagai sistem penunjang pelaporan riset dan inovasi daerah. Bentuk komunikasi ini dianggap efektif karena implementor dapat memperoleh informasi secara langsung dari pelaksana aplikasi SETIA 2.0. Setelah dilakukan sosialisasi, adanya aplikasi SETIA 2.0 mendapat respon positif karena semakin memudahkan inovator untuk melaporkan riset dan inovasinya, dan meminimalisir terjadinya duplikasi riset dan inovasi yang telah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya.

Komunikasi juga dilakukan melalui helpdesk yang tersedia di laman aplikasi SETIA 2.0 guna menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Selain berasal dari aplikasi, para perangkat daerah juga memiliki WhatsApp yang memudahkan para inovator berkomunikasi

dan berkoordinasi secara langsung kepada implementor Litbang sebagai penanggung jawab inovasi daerah. Pemilihan media ini didasari oleh beberapa alasan, salah satunya yaitu kemudahan dalam berkomunikasi. Karena target audiens terbatas pada para aparatur perangkat daerah saja, maka dibuatlah sistem yang lebih ringan dan mudah diakses.

2) Sumber Daya

Dari segi sumber daya, aplikasi SETIA 2.0 merupakan respon terhadap keterbatasan sumber daya pelaksana, sehingga dibuatlah aplikasi SETIA 2.0. Modernisasi justru meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja staf pelaksana. Keterbatasan jumlah staf tidak menghambat kinerja aplikasi SETIA 2.0, karena aplikasi SETIA masih dapat berfungsi meskipun hanya dioperasikan oleh tiga orang staf pelaksana. Kapasitas yang dimiliki dipengaruhi oleh sumber daya yang ada. Umeh dalam (Hutagalung & Hermawan, 2018) melihat kapasitas sebagai proses identifikasi dan pengembangan kemampuan yang diperlukan dalam sistem manajemen dan pengambilan keputusan pemerintahan. Namun muncul hambatan diluar hal tersebut, yaitu keterbatasan sumber daya IT yang harus menggunakan sumber daya eksternal. Adanya kerjasama yang terjalin disebabkan oleh keterbatasan kemampuan staf pelaksana, sehingga diperlukan sumber daya dari luar untuk menunjang kinerja sistem. Hal tersebut berdampak pada kendala yang mungkin terjadi pada sistem, namun tidak dapat tidak dapat segera diperbaiki oleh staf internal. Jika dilihat dari aspek sumber daya infrastruktur, kebutuhan tersebut telah terpenuhi dengan baik. Akses internet mudah diperoleh, terutama di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga kecil kemungkinan terjadinya kendala dikarenakan jaringan internet yang tidak memadai.

Secara keseluruhan, faktor sumber daya tidak memengaruhi implementasi

aplikasi SETIA 2.0 dalam menunjang kinerja pemerintah bagian Litbang. Namun, apabila mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward, maka implementasi aplikasi SETIA 2.0 belum berjalan dengan baik, karena belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya terutama sumber daya manusia, yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam mengimplementasikan aplikasi SETIA 2.0.

3) Disposisi

Sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan aplikasi SETIA 2.0 merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan transformasi digital dalam pengelolaan riset dan inovasi di Kabupaten Sidoarjo. Implementasi aplikasi SETIA 2.0 memerlukan komitmen, kesiapan mental, serta dedikasi dari para pelaksana untuk mengoperasikan sistem baru yang lebih terstruktur, transparan, dan terintegrasi.

Pertama, sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh staf pelaksana tercermin dalam ketersediaannya untuk memastikan bahwa setiap proses pengajuan riset dan inovasi dapat diawasi secara menyeluruh. Para pelaksana menunjukkan komitmen mereka dalam pemantauan setiap tahapan, mulai dari input usulan riset maupun inovasi, validasi berkas, pendampingan, hingga proses pelaporan yang kini lebih efisien berkat adanya digitalisasi aplikasi SETIA 2.0.

Kedua, sikap proaktif dan adaptif terlihat dari respon para pelaksana terhadap berbagai kebutuhan perangkat daerah. Ketika muncul permintaan untuk fitur tambahan agar perangkat daerah dapat melihat usulan inovasi dari pengusul lain, para staf pelaksana menindaklanjuti dengan mengembangkan Simlitbang menjadi aplikasi SETIA, hingga saat ini terus berkembang menjadi SETIA 2.0. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut birokrasi untuk terus beradaptasi, sehingga para pelaksana telah menunjukkan kemampuannya untuk

berkembang mengikuti teknologi yang terus diperbarui.

Secara keseluruhan, sikap-sikap implementor dalam mengimplementasikan aplikasi SETIA 2.0 dapat dinilai baik. Sikap tanggung jawab dalam memastikan administrasi, sikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan perangkat daerah innovator, serta sikap cepat beradaptasi terhadap perubahan teknologi merupakan sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi aplikasi SETIA 2.0 menjadi lebih maksimal

4) Struktur Birokrasi

Sebagai inovasi yang lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola riset dan inovasi daerah, aplikasi SETIA 2.0 memerlukan dukungan organisasi yang jelas, alur kerja yang terstandarisasi, serta pembagian peran yang terkoordinasi antar perangkat daerah. Struktur birokrasi yang diterapkan pada proses implementasi mencakup mekanisme kewenangan, prosedur kerja, dan pola koordinasi yang memfasilitasi staf pelaksana dalam menjalankan fungsi pengendalian serta monitoring riset dan inovasi daerah.

Bappeda Kabupaten Sidoarjo khususnya bagian penelitian dan pengembangan riset berperan sebagai pengendali utama seluruh proses riset dan inovasi daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kejelasan posisi Bappeda sebagai koordinator lintas perangkat daerah memberikan landasan kewenangan yang kuat dalam sistem aplikasi SETIA 2.0, terutama dalam memastikan setiap usulan inovasi telah terintegrasi melalui satu pintu, sehingga mendukung integrasi pelaporan dan meminimalkan terjadinya tumpang tindih antar perangkat daerah.

Pelaksanaan aplikasi SETIA 2.0 di dasari oleh standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo, bersumber pada panduan Peraturan Pemerintah Pusat. Petugas menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan aplikasi SETIA 2.0, sebagai penunjang tercapainya tujuan daerah.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang tertata rapi, alur kerja yang terstandarisasi, serta pembagian kewenangan yang jelas bertujuan untuk menunjang implementasi aplikasi SETIA 2.0. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Edward III dalam (Indah & Hariyanti, 2018) bahwa dalam implementasi kebijakan, SOP diperlukan sebagai salah satu pedoman agar kebijakan dapat diterapkan. Selain itu, diperlukan koordinasi untuk saling berkomunikasi dan mengatur berbagai pihak.

Simpulan dan Saran

Implementasi aplikasi SETIA 2.0 sebagai sistem pengendalian pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas tata kelola inovasi daerah. kehadiran SETIA 2.0 berhasil menjawab hambatan utama yang dikeluhkan oleh inovator seperti proses pelaporan yang masih manual, keterbatasan pendampingan, dan minimnya integrasi data antar perangkat daerah. Melalui digitalisasi ini, Bappeda Kabupaten Sidoarjo khususnya yang menangani riset dan inovasi daerah dapat melakukan pemantauan, validasi, serta pengendalian secara lebih sistematis, transparan, dan terserap dengan baik.

Keberhasilan penerapan SETIA 2.0 juga tidak terlepas dari peran sumber daya pelaksana maupun pengusul. Implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III menunjukkan empat aspek penunjang keberhasilan implementasi aplikasi SETIA 2.0.

Komunikasi dalam implementasi aplikasi SETIA 2.0 menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi. Proses sosialisasi dilakukan secara langsung kepada perangkat daerah sehingga

memungkinkan transfer informasi yang jelas terkait tujuan, alur kerja, serta penggunaan aplikasi. Dengan adanya komunikasi, dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik bagi perangkat daerah lain. Secara keseluruhan, aspek komunikasi dalam implementasi aplikasi SETIA 2.0 telah diterapkan dengan baik sehingga mampu menunjang keberhasilan dari implementasi aplikasi SETIA 2.0.

Sumber daya dalam implementasi aplikasi SETIA 2.0 masih menghadapi kendala signifikan. Keterbatasan jumlah staf yang hanya berisikan tiga orang, membuat beban pekerjaan cukup tinggi terutama terkait proses validasi, pendampingan, dan pemantauan inovasi. Walaupun demikian, sumber daya infrastruktur sudah terpenuhi dengan baik, seperti akses internet yang ada di Kabupaten Sidoarjo sudah sangat mendukung implementasi aplikasi SETIA 2.0. Secara keseluruhan, aspek sumber daya belum terpenuhi dengan baik, karena masih terdapat kekurangan signifikan pada kapasitas SDM, terutama kemampuan teknis IT dan jumlah personel pendukung.

Sikap pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan aplikasi SETIA 2.0. Bagian Litbang memperlihatkan rasa tanggung jawab yang tinggi melalui pendampingan intensif kepada para perangkat daerah serta memastikan setiap usulan riset maupun inovasi diproses secara tepat, selain itu memiliki sikap adaptif dalam merespon kebutuhan pengguna. Para pelaksana juga bersikap terbuka terhadap perkembangan teknologi dan mampu menyesuaikan diri dengan digitalisasi yang terus berkembang.

Struktur birokrasi dalam implementasi aplikasi SETIA 2.0 telah berjalan dengan baik. Bappeda khususnya bagian Rendalev Litbang memiliki kewenangan yang jelas yaitu sebagai koordinator utama seluruh proses pelaporan riset dan inovasi. Alur kerja yang ditetapkan melalui SOP berbasis

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 mendukung proses validasi dan integrasi pelaporan antar perangkat daerah. Adanya struktur birokrasi yang jelas membantu meminimalkan terjadinya tumpang tindih inovasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat penyampaian laporan.

Meskipun aplikasi SETIA 2.0 telah mampu meningkatkan efektivitas pendampingan, monitoring, dan integrasi pelaporan inovasi di Kabupaten Sidoarjo, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar pemanfaatannya dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo dengan mengalokasikan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang IT. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan pengkajian tingkat kepuasan pengguna aplikasi SETIA 2.0 dalam menunjang kinerja perangkat daerah.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai institusi tempat penulis menempuh pendidikan. Penulis juga sangat berterimakasih kepada Bappeda Kabupaten Sidoarjo, khususnya bidang Rendalev Litbang yang telah memberikan kesempatan, akses serta informasi terkait implementasi aplikasi SETIA 2.0. Penghargaan dan rasa terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh informan khususnya Bapak MUNARI KUSTANTO, S.Sos., M.Sosio, Ibu FITRIYATUS SHOLIAH, S.Si., M.Sosio, dan IBU HAPPY LISWIYANI, SH., serta kepada pihak lain yang telah meluangkan waktu dalam proses wawancara, observasi, dan diskusi selama penelitian berlangsung. Tanpa bantuan

berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat terselesaikan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Baba, M. A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Baba, M. A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Ardianto (ed.)). Penerbit Aksara Timur.f (Ardianto (ed.)). Penerbit Aksara Timur.
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. (2024). *Regulasi BSKDN*. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. <https://bskdn.kemendagri.go.id/websit e/produk-hukum/>
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. (2025). *Kabupaten Sidoarjo Raih IGA Award 2025, Bupati Subandi Dorong OPD Terus Berinovasi*. Kabupaten Sidoarjo. <https://www.sidoarjokab.go.id/berita/detail/1765417038/0>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kaulitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Herdayati, & Syahrial. (2019). Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 7(1).
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Deepublish.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya*. 12(2), 127–140.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(II), 324–334.

Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 9, 13074–13086.

Rahmani, D. A., Muhayati, S., & Kholis, I. (2025). *Analisis Data Kualitatif*. 9, 13037–13048.

Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), 39–47.

Sonn, J. W. (2021). Innovation and Regional Development. *AAG-Wiley International Encyclopedia of Geography*.

Sutmasa, Y. G. (2021). *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*. 04(01), 25–36.

Suwarno, D. (2025). *Pengaruh Penggunaan WhatsApp Group Terhadap Efektivitas Komunikasi RT-RW Di Kecamatan Patikraja*. 2(3), 918–932.